

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks, berkelanjutan, dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Setiap negara berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, baik alam maupun manusia, guna meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata, sehingga perhatian khusus diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Kontribusi pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan dan stabilitas ekonomi sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi pendapatan yang adil. Dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan kualitas tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, kesenjangan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya kecemburuan sosial, kerawanan terhadap disintegrasi wilayah, serta memperlebar disparitas ekonomi yang semakin tajam. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang semakin melebar, diperlukan konsep pemerataan pembangunan yang merata, baik dari segi hasil maupun pemerataan

pembangunan di berbagai lapisan masyarakat dan seluruh wilayah. Perbedaan yang mencolok dalam tingkat pembangunan ekonomi antar daerah sering kali menimbulkan dampak negatif yang kompleks, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Ketimpangan pembangunan ini mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya dan hasil ekonomi. Ketimpangan dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya serta memperlebar kesenjangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan menggambarkan kondisi distribusi pendapatan di suatu wilayah tidak proporsional, sehingga hanya sebagian kelompok atau wilayah yang menikmati hasil pembangunan secara signifikan (Ratnasari, 2017).

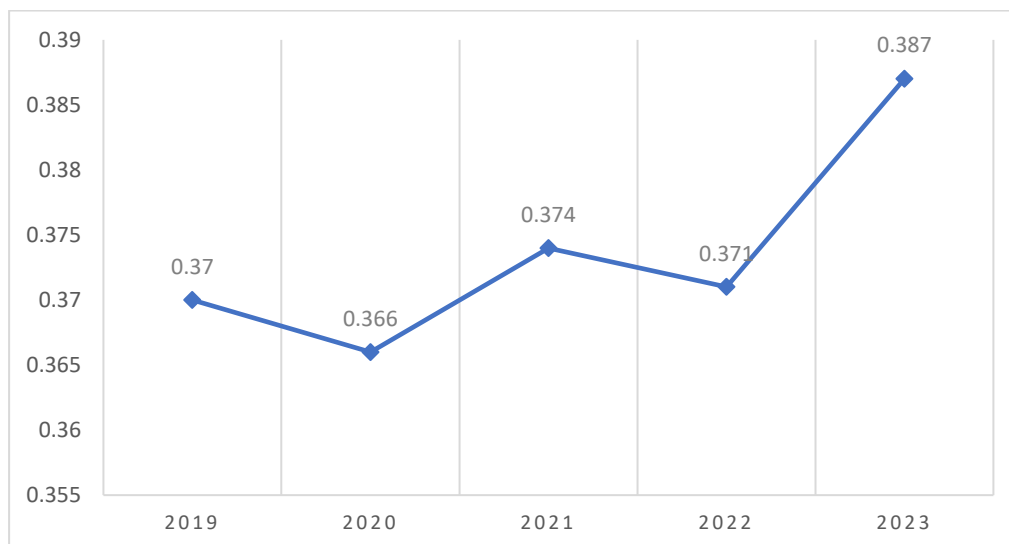
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketimpangan diartikan sebagai kondisi yang tidak seimbang, tidak adil, atau tidak memadai. Dalam konteks pembangunan, ketimpangan pendapatan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kesejahteraan dan kemakmuran telah dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.

Dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, salah satu indikator yang paling umum digunakan secara nasional adalah Koefisien Gini. Indeks ini menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu populasi bersifat merata atau timpang. Nilai Koefisien Gini berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang berarti tingkat ketimpangannya rendah.

Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pendapatan hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat, mencerminkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Secara umum, jika suatu wilayah memiliki Koefisien Gini

lebih dari 0,4, maka wilayah tersebut dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, Koefisien Gini menjadi alat penting dalam menganalisis sejauh mana pemerataan hasil pembangunan telah tercapai.

Salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi yang signifikan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau tidak inklusif. Di beberapa wilayah, pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di sektor atau daerah tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.



Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Diolah 2025

Berdasarkan data pada gambar 1.1 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di atas, perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam distribusi pendapatan. Pada tahun 2019, angka Indeks Gini tercatat sebesar 0,370, yang kemudian sedikit menurun menjadi 0,366 pada tahun 2020 yang menunjukkan adanya perbaikan kecil dalam ketimpangan pendapatan. Meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,374, angka ini masih berada dalam kisaran yang relatif stabil. Pada tahun 2022, angka Indeks Gini

kembali menurun menjadi 0,371 yang menggambarkan usaha untuk menstabilkan distribusi pendapatan.

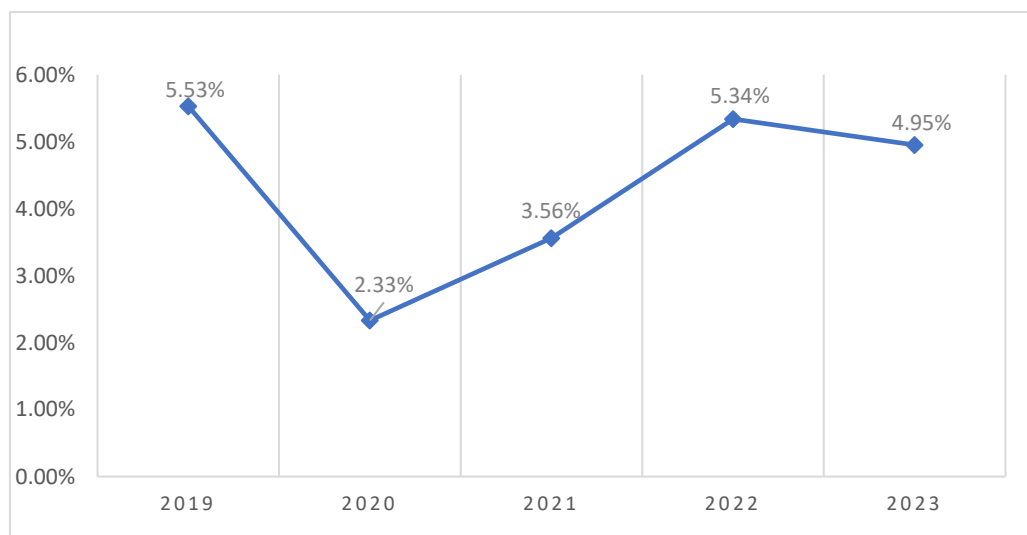
Namun, pada tahun 2023, angka Indeks Gini meningkat menjadi 0,387 yang mencerminkan peningkatan ketimpangan pendapatan signifikan. Peningkatan ini menandakan tantangan baru dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau perubahan dalam kebijakan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, meskipun ada perbaikan di beberapa tahun sebelumnya, kenaikan angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan dalam indeks Gini mencerminkan kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak selalu diikuti dengan pemerataan manfaat di seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kecil pada tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan struktural dalam permasalahan ekonomi, yang salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai indikator penting dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi, menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan dan sebaliknya. Dalam banyak kasus, laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan, terutama jika pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu. Sebaliknya, pertumbuhan yang melambat pun dapat mempersempit ruang redistribusi pendapatan, sehingga tetap mempertahankan ketimpangan yang ada. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya melihat besarnya

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut terdistribusi secara merata di seluruh kelompok masyarakat (Amali & Syafri, 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan pembangunan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika dipertahankan secara konsisten dalam jangka panjang (Nilasari & Amelia, 2022).



Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Diolah 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada gambar 1.2 di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menunjukkan fluktuasi pada tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,53 persen yang mencerminkan kinerja ekonomi yang cukup kuat. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi 2,33 persen yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, pertumbuhan

kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,56 persen dan stabil di 5,34 persen pada tahun 2022.

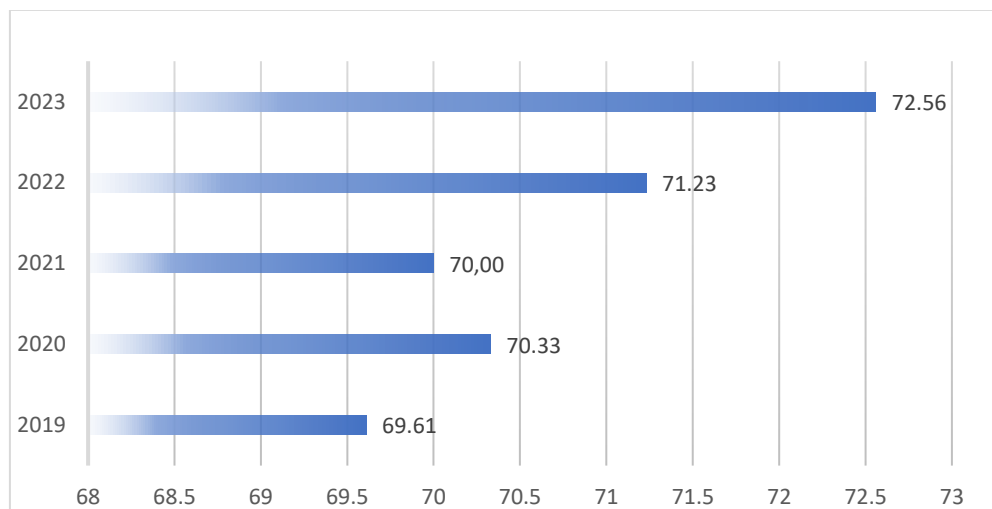
Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya, laju pertumbuhan pada tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan yaitu menjadi 4,95 persen. Meskipun terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang sejalan dengan perbaikan kondisi global dan domestik. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur, sekaligus menggambarkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam konteks perekonomian yang lebih luas.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan distribusi hasil pembangunan secara merata. Salah satu faktor yang turut memengaruhi hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Meskipun ekonomi tumbuh, jika partisipasi masyarakat dalam pasar kerja tidak merata baik secara geografis maupun demografis maka hasil pembangunan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Salah satu aspek penting dalam mencermati kesenjangan ekonomi adalah tingkat partisipasi penduduk dalam pasar tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Rannu & Rasji, 2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Indikator ini tidak hanya menunjukkan dinamika pasar tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan seberapa merata akses terhadap kesempatan kerja yang dapat dianalisis lebih

lanjut berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin (Sianturi *et al.*, 2024).

Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa disparitas TPAK antar daerah mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap kesempatan kerja yang layak. Ketimpangan ini berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi, karena tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang setara untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan secara optimal.



**Gambar 1. 3 Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023**
Sumber : Badan Pusat Statistik Diolah 2025

Berdasarkan data jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja pada gambar 1.3 dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan partisipasi tenaga kerja secara konsisten. Pada tahun 2019, TPAK tercatat sebesar 69,61 persen, kemudian meningkat menjadi 70,33 persen pada tahun 2020. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 70,00 persen pada tahun 2021, angka tersebut kembali naik pada tahun 2022 menjadi 71,23 persen, dan mencapai nilai tertinggi sebesar 72,56 persen pada tahun 2023.

Peningkatan TPAK ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja

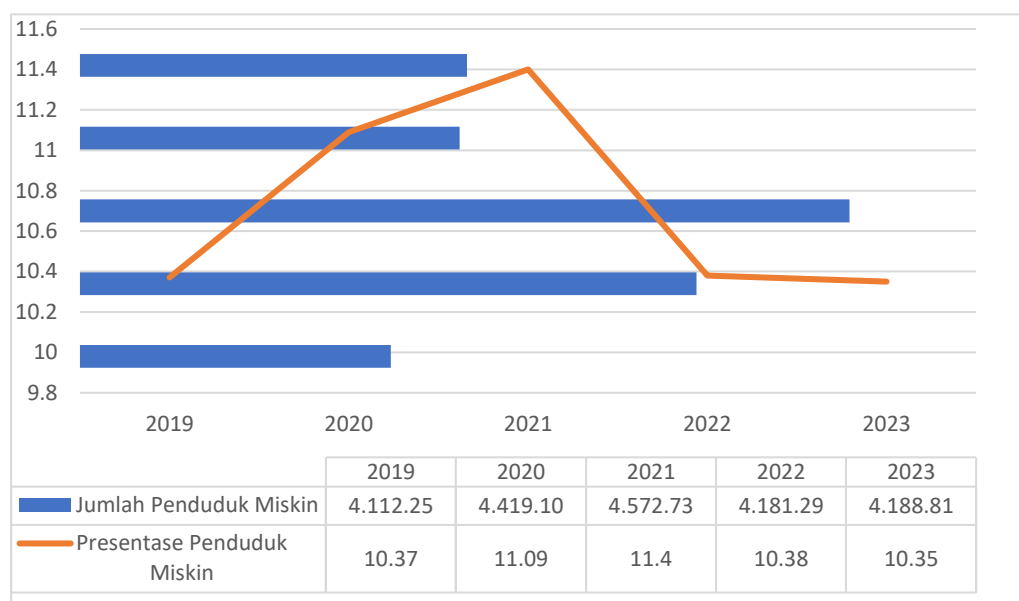
maupun sedang mencari pekerjaan. Namun, tingginya angka partisipasi angkatan kerja tidak selalu mencerminkan kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja yang layak di seluruh wilayah. Peningkatan partisipasi yang hanya terjadi di wilayah atau sektor tertentu dapat memperbesar kesenjangan ekonomi.

Namun demikian, meskipun TPAK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut belum tentu langsung berdampak positif terhadap penurunan kesenjangan ekonomi. Jika peningkatan partisipasi tenaga kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang layak, merata, dan produktif, maka manfaatnya hanya akan dirasakan oleh kelompok tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian besar angkatan kerja terserap ke sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Dalam konteks inilah pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong kuantitas partisipasi tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja yang tersedia, agar dapat benar-benar menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan ekonomi antar kelompok dan wilayah.

Todaro menganggap bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sangat penting bagi negara untuk memastikan bahwa seluruh angkatan kerja mendapatkan akses yang setara terhadap peluang pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Hal ini memungkinkan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan struktural dalam ekonomi dan berpartisipasi secara efektif dalam sektor-sektor yang lebih produktif. Pada akhirnya, hal ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan ekonomi yang ada. Tanpa perbaikan dalam kualitas tenaga kerja, ketimpangan dan kemiskinan mungkin tetap bertahan atau bahkan memburuk.

Todaro dan Smith dalam bukunya *Economic Development* (2003) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang bersifat multidimensi dan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata. Mereka menyatakan bahwa kemiskinan juga terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang pekerjaan. Kemiskinan menurut mereka dapat menciptakan siklus yang terus berulang, di mana kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak menyebabkan generasi berikutnya terjebak dalam kemiskinan. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin besar.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan umumnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperluas peluang penghasilan, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dalam sasaran pembangunan nasional (Delviera *et al.*, 2024).



Gambar 1. 4 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Diolah 2025

Dapat diketahui dari data pada gambar 1.4 jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang menggambarkan perkembangan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 4.112,25 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,37 persen. Kemudian pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 4.419,10 ribu orang, diiringi dengan sedikit peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 11,09 persen.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 4.572,73 ribu orang. Tingkat kemiskinan juga naik menjadi 11,4 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk miskin, meskipun persentasenya hanya sedikit lebih tinggi. Fluktuasi kembali terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah penduduk miskin sedikit turun menjadi 4.181,29 ribu orang, namun tingkat kemiskinan menurun sedikit menjadi 10,38 persen. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 4.188,81 ribu orang. Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 10,35 persen.

Perkembangan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan yang mengindikasikan perbaikan ekonomi, meskipun jumlah penduduk miskin secara absolut masih cukup tinggi. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut menandakan bahwa lebih banyak penduduk berhasil keluar dari kemiskinan relatif, yang berarti ada perbaikan dalam distribusi kesejahteraan. Walaupun tantangan tetap ada, kondisi ini mencerminkan keberhasilan sejumlah upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi

oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, disparitas partisipasi angkatan kerja, serta tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah. Meskipun berbagai indikator menunjukkan adanya tren perbaikan dari tahun ke tahun, kesenjangan antar daerah masih menjadi tantangan yang nyata dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Beberapa penelitian sebelumnya cenderung membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah dan belum banyak yang mengkaji hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan tingkat kemiskinan terhadap kesenjangan ekonomi dalam satu kerangka empiris, khususnya di konteks Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis secara menyeluruh bagaimana ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi kesenjangan ekonomi, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam menekan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di daerah tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan yakni baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan dalam perkembangan ekonomi terkhususnya pada ekonomi regional yang berguna untuk mengetahui kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi, TPAK, dan tingkat kemiskinan terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperbaiki kebijakan terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan tingkat kemiskinan terhadap kesenjangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Temuan penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di tingkat provinsi. Dengan adanya analisis yang

mendalam mengenai faktor-faktor ekonomi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.